

Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi: Bagaimana Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia

Amrie Firmansyah^{(1)*}, Rahmat Hollyson⁽²⁾

⁽¹⁾Politeknik Keuangan Negara STAN

⁽²⁾Institut STIAM

*email: amrie@pknstan.ac.id

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem informasi, kompetensi pegawai, komitmen organisasi terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara (BMN) pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai alat untuk mengumpulkan data terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Kuisioner disebarkan kepada 199 orang pengelola Barang Milik Negara melalui google form. Jumlah kuisioner yang telah diisi responden melalui secara lengkap berasal dari 63 responden. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan BMN, namun kompetensi pegawai dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan BMN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi sangat mendominasi untuk dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BMN, namun kompetensi pegawai dan komitmen organisasi tidak terlalu berkontribusi dalam kesuksesan pengelolaan BMN.

Kata kunci: Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi, Barang Milik Negara

Abstract.

This study aims to examine the effect of information systems, employee competence, organizational commitment on the quality of state property management (BMN) at the Directorate General of Highways, Ministry of Public Works and Public Housing. The test method used in this research is to use quantitative methods. This study uses a questionnaire as a tool to collect data related to the variables used in the study. Questionnaires were distributed to 199 State Property managers via google form. The number of questionnaires that have been completely filled out by respondents comes from 63 respondents. Hypothesis testing is done by using multiple linear regression analysis. This study concludes that the information system has a positive effect on the quality of BMN management, but employee competence and organizational commitment have no effect on the quality of BMN management. The results of this study indicate that information systems dominate to improve the quality of BMN management, but employee competence and organizational commitment do not really contribute to the success of BMN management.

Keywords: Information System, Employee Competence, Organizational Commitment, State Property

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan aktivitasnya berupa pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah membutuhkan aset berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan (Republik Indonesia, 2010). Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan

dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Di sektor pemerintahan, aset erat kaitannya dengan istilah Barang Milik Negara (BMN). BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Republik Indonesia, 2014). Fungsi aset pemerintah yang termasuk dalam BMN

berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial (Republik Indonesia, 2014). Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi Pemerintah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang (Hasanah & Fauzi, 2017).

Dalam rangka penyediaan dasar layanan masyarakat, BMN banyak digunakan untuk penyediaan infrastruktur. Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur meliputi bidang transportasi, jalan, sumber daya air dan pengairan, air minum, air limbah, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, persampahan, minyak dan gas bumi (Menteri Keuangan, 2014). Tujuan dan arah pengelolaan BMN adalah memperkuat, meningkatkan, dan mempertahankan kualitas informasi keuangan, memperkuat kualitas dan daya tahan, menghindari fraud dan mempertahankan target opini Badan Pemeriksaan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (BPPK Kemenkeu, 2015). Pemanfaatan BMN berakibat pada penyajian aset pada neraca pemerintah. Pengelolaan BMN yang baik dapat menyajikan data dan informasi aset yang dapat dijadikan pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

Terkait dengan hal tersebut, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya (Republik Indonesia, 2004). Selain itu, Pengguna Barang juga wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, termasuk Laporan BMN Pengguna/Kuasa Pengguna (Republik Indonesia, 2004). Oleh karena itu, pengelolaan BMN perlu dikelola dengan baik dan benar untuk dapat mewujudkan pengelolaan BMN yang transparan, efisien, dan akuntabel. Kualitas pengelolaan ini terkait dengan kepercayaan masyarakat atas BMN yang dikelola oleh Pemerintah.

Sebagai salah satu unsur demi terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang bertanggung jawab, sangat diperlukan adanya program dan sistem pengelolaan Barang Milik Negara secara baik dan berkesinambungan.

Dalam kenyataannya, pengelolaan BMN belum dikelola secara efektif dan efisien sebagaimana catatan atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Kemenkumham, 2017). Adanya permasalahan tata kelola aset di daerah salah satunya dipengaruhi pengelolaan aset negara yang tidak jelas status hukumnya atau bersengketa (BPKP, 2015). Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi terkait dengan BMN bukan hanya terjadi pada level pemerintah pusat, namun juga mengakibatkan permasalahan di level pemerintah daerah. Padahal BMN yang dikelola dengan baik oleh pemerintah pusat dan daerah mempunyai peran strategis dalam menopang pendapatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kurang optimalnya pengelolaan BMN baik itu berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, menyebabkan tidak satu pun instansi pemerintah yang dapat menyajikan data secara pasti mengenai berapa sesungguhnya nilai aset tersebut. Pencatatan atas aset merupakan masalah utama dalam pengelolaan aset seperti BMN tersedia namun catatannya tidak dilakukan atau pemiliharaan dilakukan namun BMN nya tidak tersedia (Itjen KemenPUPR, 2020). Selain itu, BMN tidak diketahui keberadaannya atau rusak berat namun belum diusulkan penghapusannya (Itjen KemenPUPR, 2020).

Pertumbuhan nilai BMN yang cukup signifikan merupakan hasil dari pelaksanaan inventarisasi dan penilaian atas seluruh aset Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan pada tahun 2007 s.d. 2012 (DJKN Kemenkeu, 2017). Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian merupakan bagian dari perbaikan tata kelola aset di mana terjadinya peningkatan kualitas opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat (LKPP) (DJKN Kemenkeu, 2017). Mulai tahun 2007, Kementerian Keuangan menjalankan program tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum, dengan kegiatan prioritasnya adalah pelaksanaan inventarisasi dan penilaian (DJKN Kemenkeu, 2017). Perbaikan tata kelola BMN terus dilakukan dengan melakukan sertifikasi BMN berupa tanah yang dimulai pada tahun 2012 (DJKN Kemenkeu, 2017). Program percepatan sertifikasi dilaksanakan mulai tahun 2013 dengan prioritas pada penyelesaian atas BMN berupa tanah yang telah berstatus free and clean (DJKN Kemenkeu, 2017).

Pengelolaan BMN yang tidak dilakukan dengan baik dapat berdampak pada kurang andalnya informasi laporan keuangan yang diberikan pemerintah kepada publik. Kualitas pengelolaan aset pemerintah itu dapat dilihat dari kualitas data yang diberikan kepada publik dan kekuatan dari pengelolaan aset itu sendiri (Garmendia & Kapur, 2013). Pemerintah selaku penyedia informasi harus memberikan informasi BMN yang lebih transparan kepada publik. Adanya perubahan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual yang dimulai tahun 2015 merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas informasi BMN. Namun, upaya Pemerintah tersebut tidak mudah untuk dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, pengujian atas pengelolaan BMN perlu untuk dilakukan.

Adanya peraturan perundangan atas penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual mulai tahun 2015 termasuk penerapannya pada BMN memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap tingkat kompetensi pegawai dalam pengelolaan BMN dengan menggunakan aturan yang baru standar baru. Pengujian pengelolaan BMN masih jarang dilakukan. Arlini et al. (2014) membuktikan bahwa kompetensi pegawai dalam suatu organisasi yang baik dapat meningkatkan pengelolaan BMN. Sejalan dengan penelitian tersebut

Ekayanti et al. (2018) dan Gunawan et al. (2017) menyimpulkan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap pengelolaan BMD. Namun, Azhar et al. (2013) menemukan bahwa kompetensi dari aparatur daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan aset daerah/BMD. Sementara itu, Puspitarini et al. (2017) menemukan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual pada BMN. Firmansyah et al. (2020a) menyimpulkan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual pada BMD. Adanya variasi hasil pengujian dalam penelitian sebelumnya mengakibatkan pengujian kompetensi pegawai terhadap dalam pengelolaan BMN perlu dilakukan kembali dengan menggunakan data penelitian yang berbeda.

Penerapan sistem informasi di setiap instansi pemerintah dimungkinkan masih berbeda-beda, sehingga perlu pengujian kembali sistem informasi terhadap kualitas pengelolaan BMN dengan objek berbeda. Saat ini, sistem informasi sangat penting dalam suatu organisasi karena pemanfaatan sistem informasi banyak dilakukan dalam berbagai aktivitas saat ini. Adanya hasil perbedaan dalam penelitian sebelumnya, maka penelitian ini perlu melakukan pengujian kembali sistem informasi dalam pengelolaan BMN/BMD dengan menggunakan objek yang berbeda. Pengujian atas sistem informasi terhadap pengelolaan BMN dan BMD juga telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Arlini et al. (2014) menyimpulkan bahwa sistem informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan BMN. Sejalan dengan hasil pengujian tersebut, Ekayanti et al. (2018), dan Rosihan et al. (2017) sistem informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan BMD. Sementara itu, Wahyuni et al. (2018) menemukan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan BMD. Puspitarini et al. (2017)

menyimpulkan bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas implementasi akuntansi berbasis akrual pada BMN. Selanjutnya, Firmansyah et al. (2020b) menemukan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas implementasi akuntansi berbasis akrual pada BMD. Perbedaan hasil pengujian dalam penelitian sebelumnya, perlunya pengujian kembali sistem informasi terhadap kualitas pengelolaan BMN perlu dilakukan.

Selanjutnya, pengujian komitmen organisasi masih memiliki hasil yang berbeda. Ekayanti et al. (2018) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap keefektifan pengelolaan BMD. Penelitian tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi malah semakin rendah tingkat efektivitas pengelolaan aset tetap. Namun, Gunawan et al. (2017), dan Rosihan et al. (2017) menyimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan BMD. Pengujian dalam penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan data BMD, namun relevan dengan pengujian komitmen organisasi terhadap kualitas pengelolaan BMN. Sementara itu, Firmansyah et al. (2020a) menyimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual pada BMD. Adanya perbedaan hasil pengujian dalam penelitian sebelumnya, mengakibatkan pengujian atas komitmen organisasi terhadap pengelolaan BMN perlu untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kompetensi pegawai, sistem informasi, dan komitmen organisasi terhadap Pengelolaan BMN. Penelitian sebelumnya yang menggunakan data penelitian berupa BMN dilakukan oleh Arlini et al. (2014) yaitu BMN di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Puspitarini et al. (2017) yaitu BMN pada beberapa Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat. Penelitian ini

menggunakan data pengelolaan BMN di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Instansi instansi ini sangat berkaitan dengan pengelolaan BMN karena tugas dan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan jalan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki kontribusi dalam perbaikan kebijakan pengelolaan BMN di KemenPUPR dan DJKN selalu instansi pembina kepada seluruh satuan kerja Kementerian Lembaga di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan memberikan angket kepada responden penelitian yaitu pengelola barang milik negara. Metode pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan instrumen angket untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang disebarkan kepada seluruh subjek penelitian. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pengelolaan barang milik negara. Indikator-indikator yang digunakan mewakili kualitas pengelolaan BMN mengikuti Gunawan et al. (2017) yang telah disesuaikan untuk BMN adalah identifikasi aset yang dibutuhkan, identifikasi kebutuhan dana atas pengadaan aset, proses pengadaan aset, dukungan pemeliharaan aset, penilaian aset dan penghentian aset.

Variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari sistem informasi, kompetensi pegawai, dan komitmen organisasi. Sistem informasi menggunakan indikator yang digunakan oleh Ekayanti et al. (2018), Firmansyah et al. (2020b), Puspitarini et al. (2017) yaitu ketersediaan SOP, ketersediaan fasilitas, kelengkapan input data, mudah untuk dioperasikan, dukungan dan koordinasi, keandalan, kelengkapan output data, penyediaan informasi akumulasi penyusutan dan informasi tepat waktu.

Kompetensi pegawai menggunakan indikator yang digunakan Firmansyah et al. (2020a) dan Sedarmayanti & Elianie (2015) yaitu keterampilan melaksanakan tugas-tugas rutin, keterampilan mengelola tugas yang berbeda, keterampilan mengambil tindakan cepat dan tepat, keterampilan bekerjasama dan keterampilan beradaptasi. Komitmen organisasi dengan menggunakan gabungan indikator yang digunakan oleh Ekayanti et al. (2018), Firmansyah et al. (2020a), Gunawan et al. (2017) yaitu keyakinan kuat dari individu untuk tetap terikat dengan organisasi, keinginan untuk berkontribusi dalam bentuk pekerjaan untuk mencapai tujuan dan organisasi merupakan tempat yang selayaknya untuk individu bekerja.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola barang milik negara pada instansi Pemerintah Pusat yang berdomisili dan/atau melakukan aktivitas pekerjaan di Kantor Pusat. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Setiap pernyataan yang terdapat dalam angket diberikan lima pilihan jawaban, yaitu “sangat setuju/sangat memahami” bernilai 5, “setuju/memahami” bernilai 4, “netral” bernilai 3, “tidak setuju/tidak memahami” bernilai 2, dan “sangat tidak setuju/sangat tidak memahami” bernilai 1.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan secara regresi linear berganda dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Model regresi berganda atas variabel penelitian dapat disusun dengan fungsi/persamaan sebagai berikut:

$$\text{KualBMN} = \alpha + \beta_1\text{SI} + \beta_2\text{KomPeg} + \beta_3\text{KomOrg} + \varepsilon$$

Di mana:

KualBMN : Kualitas Pengelolaan BMN

α : Konstanta
 β_1-3 : Koefisien Regresi
 SI : Sistem Informasi
 KomPeg : Kompetensi Pegawai
 KomOrg : Komitmen Organisasi
 ε : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada rentang waktu bulan Oktober 2019 hingga Januari 2020 dengan menggunakan data primer melalui angket. Penyebaran angket dilakukan dengan cara menyebarkan secara langsung melalui email kepada responden dengan menggunakan media internet melalui alamat tautan <https://goo.gl/forms/oGEAV5oxHEkPCI8k>. Angket diberikan kepada 199 responden yang merupakan Pengelola BMN yang berkerja di Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pengelola BMN merupakan PNS yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menatausahakan BMN. Dari total 199 responden yang diberikan link isian kuisioner penelitian, sebanyak 63 kuisioner penelitian dikembalikan oleh responden dan dinyatakan valid (31,66%). Jumlah ini telah memenuhi jumlah sampel minimal dalam suatu penelitian karena lebih 4 kali dari jumlah variabel dalam penelitian yaitu lebih dari 40 angket (Sugiyono, 2016).

Tabel 3, 4, 5, 6 merupakan rekapitulasi hasil uji validitas terhadap instrumen item angket untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini. Masing-masing tabel menggambarkan hasil uji validitas terhadap masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel 3 merupakan rekapitulasi hasil uji validitas item angket untuk variabel kualitas pengelolaan BMN.

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Angket untuk Variabel Kualitas Pengelolaan BMN

Kode	Pearson Correlation	r _{tabel}	Keterangan
Q1	0.653	0.248	Valid
Q2	0.854	0.248	Valid
Q3	0.846	0.248	Valid

Q4	0.813	0.248	Valid
Q5	0.629	0.248	Valid
Q6	0.688	0.248	Valid
Q7	0.791	0.248	Valid
Q8	0.730	0.248	Valid

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 1 seluruh instrumen pertanyaan dalam angket terkait variabel kualitas pengelolaan BMN memiliki nilai *pearson correlation* atau $r_{hitung} > r_{tabel}$. Nilai terendah dari r_{hitung} dari instrumen item angket terkait variabel kualitas pengelolaan BMN adalah 0,629,

sedangkan nilai $r_{tabel} = 0,248$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen item dalam angket terkait variabel kualitas pengelolaan BMN dinyatakan valid.

Selanjutnya, Tabel 2 menunjukkan rekapitulasi hasil uji validitas untuk item angket variabel sistem informasi

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Angket Variabel Sistem Informasi

Kode	<i>Pearson Correlation</i>	r_{tabel}	Keterangan
Q1	0.776	0.248	Valid
Q2	0.786	0.248	Valid
Q3	0.919	0.248	Valid
Q4	0.876	0.248	Valid
Q5	0.899	0.248	Valid
Q6	0.927	0.248	Valid
Q7	0.75	0.248	Valid
Q8	0.828	0.248	Valid
Q9	0.913	0.248	Valid
Q10	0.855	0.248	Valid

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 2 seluruh instrumen item angket terkait variabel sistem informasi memiliki nilai *pearson correlation* atau $r_{hitung} > r_{tabel}$. Nilai terendah dari r_{hitung} dari instrumen pertanyaan dalam angket

terkait variabel sistem informasi adalah 0,629, sedangkan nilai $r_{tabel} = 0,248$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen item angket untuk variabel sistem informasi dinyatakan valid.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Angket untuk Variabel Kompetensi Pegawai

Kode	<i>Pearson Correlation</i>	r_{tabel}	Keterangan
Q1	0.862	0.248	Valid
Q2	0.894	0.248	Valid
Q3	0.652	0.248	Valid
Q4	0.837	0.248	Valid
Q5	0.652	0.248	Valid
Q6	0.745	0.248	Valid
Q7	0.835	0.248	Valid
Q8	0.902	0.248	Valid
Q9	0.864	0.248	Valid
Q10	0.894	0.248	Valid

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 3 seluruh instrumen item angket terkait variabel kompetensi pegawai memiliki nilai *pearson correlation* atau $r_{hitung} > r_{tabel}$. Nilai terendah dari r_{hitung} dari instrumen pertanyaan dalam angket terkait variabel kompetensi pegawai adalah 0,652, sedangkan nilai $r_{tabel} = 0,248$.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen item angket terkait variabel kompetensi pegawai dinyatakan valid.

Rekapitulasi hasil uji validitas untuk variabel komitmen organisasi ditunjukkan dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Angket Variabel Komitmen Organisasi

Kode	<i>Pearson Correlation</i>	r_{tabel}	Keterangan
Q1	0.824	0.248	Valid
Q2	0.679	0.248	Valid
Q3	0.614	0.248	Valid
Q4	0.786	0.248	Valid
Q5	0.795	0.248	Valid
Q6	0.782	0.248	Valid
Q7	0.828	0.248	Valid
Q8	0.754	0.248	Valid
Q9	0.417	0.248	Valid
Q10	0.802	0.248	Valid

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4 seluruh instrumen item angket terkait variabel komitmen organisasi memiliki nilai *pearson correlation* atau $r_{hitung} > r_{tabel}$. Nilai terendah dari r_{hitung} dari instrumen pertanyaan dalam angket terkait variabel komitmen organisasi adalah 0,417, sedangkan nilai $r_{tabel} = 0,248$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen item angket terkait variabel komitmen organisasi dinyatakan valid.

Selanjutnya, tabel 5 berikut menyajikan hasil uji reliabilitas terhadap variabel dalam penelitian ini. Berdasarkan Tabel 5 seluruh variabel angket dalam penelitian ini memiliki nilai *cronbach alpha* (α) $> 0,6$ (Sujarweni, 2015). Nilai terendah dari *cronbach alpha* (α) dari variabel angket dalam penelitian ini adalah variabel kualitas pengelolaan BMN sebesar 0,888. Oleh karena itu, seluruh variabel angket dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i> (α)	Keterangan
Kualitas Pengelolaan BMN	0.888	Reliabel
Sistem Informasi	0.958	Reliabel
Kompetensi Pegawai	0.943	Reliabel
Komitmen Organisasi	0.897	Reliabel

Sumber: data diolah

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif yang digunakan berupa nilai minimum, maksimum, median, *mean*, dan standar deviasi. Nilai di atas 3 menggambarkan persepsi responden untuk

cenderung setuju terkait instrumen pernyataan yang menyusun variabel tersebut, sedangkan nilai di bawah 3 menggambarkan persepsi responden untuk cenderung tidak setuju terkait dengan item

angket yang menyusun variabel tersebut. deskriptif untuk keseluruhan variabel dalam Tabel 6 berikut menyajikan statistik penelitian ini.

Tabel 6 Statistik Deskriptif Kualitas Pengelolaan BMN, Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.	Med.
Kualitas Pengelolaan BMN (Y)	63	1.75	5.00	4.0853	0.63652	4.125
Sistem Informasi (X1)	63	1.00	5.00	4.0270	0.70989	4
Kompetensi Pegawai (X2)	63	1.30	5.00	4.1206	0.65060	4.1
Komitmen Organisasi (X3)	63	1.20	5.00	3.6857	0.66523	3.7

Sumber: data diolah

Secara keseluruhan, kualitas pengelolaan BMN, sistem informasi, kompetensi pegawai dan komitmen organisasi memiliki nilai *mean* dan *median* di atas 3. Berdasarkan data tersebut, secara umum responden setuju bahwa kualitas pengelolaan BMN telah dilaksanakan dengan baik, adanya penyediaan sistem informasi yang baik, responden merasa memiliki kompetensi yang baik dan responden merasa bahwa di dalam pekerjaannya terdapat komitmen organisasi yang baik. Namun, apabila dilihat dari nilai angket minimal masih terdapat nilai di bawah 3, hal ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang merasa bahwa kualitas pengelolaan BMN masih belum dapat dilaksanakan dengan baik, sistem informasi yang buruk, pegawai tidak

memiliki kompetensi yang baik dalam pekerjaannya, maupun terdapat komitmen organisasi yang kurang baik. Dari empat variabel, rata-rata terkecil untuk untuk item angket adalah variabel komitmen organisasi dibandingkan dengan rata-rata untuk variabel lainnya. Hal ini dimungkinkan bahwa responden tidak terlalu merasa bahwa pekerjaannya sebagai pengelola BMN tidak terlalu membutuhkan komitmen organisasi yang tinggi. Apabila melihat nilai minimum dari item angket, sistem informasi memiliki nilai terendah dibandingkan dengan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang merasakan bahwa sistem informasi dalam pengelolaan BMN tidak semuanya dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya, hasil ringkasan uji hipotesis adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Ringkasan hasil uji regresi model penelitian

Variabel	Coeff	t	Sig.
(Constants)	5.896	2.504	.015 **
X1	.504	7.062	.000 ***
X2	.066	.947	.347
X3	.103	1.374	.175
Adj. R ²	.722		
F-stat.	54.742		
Prob (F-Stat)	.000		

Sumber: data diolah

Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Kualitas Pengelolaan BMN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, sistem informasi berpengaruh

positif terhadap kualitas pengelolaan BMN. Hasil pengujian ini sejalan dengan Ekayanti et al. (2018) yang menggunakan objek pegawai Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara, Arlini et al., (2014) dengan menggunakan objek pengelola aset di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Rosihan et al. (2017) yang menggunakan objek pengelola aset di Pemerintah Propinsi Papua. Dari hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi dalam pengelolaan BMN/BMD memberikan hasil yang sama. Hasil pengujian ini juga mengkonfirmasi hasil pengujian yang dilakukan oleh Puspitarini et al. (2017) terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual pada BMN. Tingkat keberhasilan pengelolaan BMN sangat tergantung dari sistem informasi yang baik. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan Wahyuni et al. (2018) dan Firmansyah et al. (2020b)

Aplikasi sistem informasi dalam pengelolaan BMN pada dasarnya disediakan oleh Instansi Pembina yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang disediakan untuk Kementerian dan Lembaga yaitu Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN dan (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) SIMAN (DJKN Kemenkeu, 2017). SIMAK BMN merupakan rangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, SIMAN BMN merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola dan Pengguna. SIMAK BMN dan SIMAN saling berkaitan karena SIMAK BMN merupakan sumber data dari SIMAN (DJKN Kemenkeu, 2017).

Penyediaan SIMAN oleh DJKN digunakan oleh Kementerian/Lembaga dilakukan mulai Semester 1 tahun 2015

(DJKN Kemenkeu, 2017). SIMAN sudah selayaknya digunakan oleh Ditjen Bina Marga yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menu yang terdapat dalam SIMAN mampu meng-update data SIMAN yang bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), hal ini akan dapat digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi BMN secara mandiri (DJKN Kemenkeu, 2017). Salah satu kelebihan SIMAN adalah dapat memudahkan konsolidasi data yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui pengiriman data pada akhir periode rekon antara server kantor operasional ke server kantor pusat. Melalui SIMAN konsolidasi data dapat dilakukan secara real time. Dalam rekonsiliasi data BMN, pihak Ditjen Bina Marga tidak harus langsung berhadapan dengan pihak DJKN untuk menyampaikan Arsip Data Komputer (ADK). Namun, rekonsiliasi data dapat disampaikan melalui SIMAN dengan memiliki koneksi internet, dapat melakukan rekonsiliasi dan mencetak Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

Selain itu, di tahun tahun 2018, DJKN mengeluarkan aplikasi sistem informasi baru untuk pengelolaan BMN yaitu Sistem Informasi Permohonan Penilaian Barang Milik Negara (SIPP BMN) (DJKN Kemenkeu, 2017). SIPP BMN merupakan salah satu bentuk program perubahan dan inovasi dalam penilaian BMN agar semakin efektif dan efisien, serta membantu pengguna untuk memonitoring perkembangan pengajuan penilaian BMN.

Berdasarkan uraian di atas, sudah jelas bahwa sistem informasi dalam pengelolaan BMN sangat sangat menunjang peningkatan kualitas pengelolaan BMN khususnya di Kementerian/Lembaga. Penyediaan aplikasi yang diberikan DJKN selalu instansi pembina kepada seluruh satuan kerja Kementerian Lembaga. Pengelolaan BMN merupakan salah satu representasi fungsi Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN).

Pengelolaan BMN berkembang secara signifikan setelah fungsinya diberikan kepada DJKN mulai tahun 2006 (DJKN Kemenkeu, 2017).

Sebelum tahun 2013, sebagian besar proses pengelolaan BMN dilakukan secara manual yang dalam praktiknya masih sering terjadi ketidakseragaman pemahaman dan tindakan antara pengguna dan pengelola barang (DJKN Kemenkeu, 2017). Hal ini mengakibatkan penyajian data menjadi kurang akurat sehingga proses evaluasi dan monitoring menjadi terhambat. Oleh karena itu, dengan kehadiran aplikasi SIMAN, diharapkan dapat terwujud kesamaan persepsi antara pengguna dengan pengelola barang, standardisasi dalam pengelolaan BMN, serta meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan akurasi prosedur pengelolaan BMN.

Selain itu, hingga saat ini pengelolaan BMN di seluruh instansi Kementerian/Lembaga masih berfokus pada pembangunan database yang valid dan handal. Hal ini salah satunya disebabkan dari temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di mana masih terdapat BMN yang dikuasai oleh pihak ketiga, BMN yang bersengketa serta BMN yang tidak diketahui keberadaannya. Sistem informasi menjadi suatu hal yang sangat krusial untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terlebih pada Direktorat Jenderal Bina Marga yang memiliki nilai BMN $\pm 60\%$ dari nilai BMN Kementerian PUPR. Dengan adanya sistem informasi yang baik, maka akan tercipta database yang handal yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik negara.

Kualitas suatu sistem informasi tidak hanya diukur oleh kualitas perangkat lunak dan output, di mana kualitas output yang dihasilkan oleh sistem akan tergantung pada kelengkapan data menjadi input yang benar. Semakin lengkap data pendukung dari BMN yang diakui atau dicatat ke dalam basis data, informasi yang dihasilkan akan lebih lengkap dan informatif. Semakin baik fungsi

validasi data entri dalam suatu sistem, informasi yang dihasilkan akan menjadi akurasi lebih terjamin. Semakin baik kualitas input validasi dalam sistem akan meningkatkan kualitas informasi pada keluaran sistem akan berimplikasi pada peningkatan kualitas BMN oleh pengguna informasi. Oleh karena itu, dengan semakin baiknya penerapan sistem informasi atas pengelolaan BMN dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu.

Terkait dengan pelaksanaan pengelolaan BMN di Ditjen Bina Marga, SOP atas pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan dengan baik dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan BMN. Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan SOP mengakibatkan tertibnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN. Respon atas sistem informasi yang begitu besar dari Ditjen Bina Marga ditunjukkan dengan adanya dukungan fasilitas dari internal instansi agar penerapan sistem informasi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pelaksanaan prosedur.

Dengan demikian, penginputan data BMN dapat dilakukan secara lengkap. Selain itu, sistem BMN dapat memberikan data output yang diinginkan secara lengkap. Sistem informasi dalam pengelolaan BMN yaitu SIMAN yang mudah untuk dioperasikan mendukung peningkatan pengelolaan BMN. Oleh karena itu, penggunaan sistem informasi BMN dapat diandalkan dan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan BMN. Adanya dukungan pimpinan di Ditjen Marga penggunaan sistem informasi pengelolaan BMN juga meningkatkan kualitas pengelolaan BMN. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan instansi di Ditjen Bina Marga sudah menganggap sistem informasi saat ini sangat penting digunakan dalam suatu organisasi khususnya dalam pengelolaan BMN. Dengan demikian, dapat diperoleh manfaat dari penggunaan sistem informasi untuk semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai kondisi BMN terkini.

Sifat responsif dari Ditjen Bina Marga terhadap perkembangan sistem informasi dengan disediakannya aplikasi sistem informasi oleh DJKN mendukung pengelolaan BMN di Ditjen Bina Marga dengan baik. Mengingat tugas dan fungsinya yang sebagian besar mengelola jalan nasional (+ 60% dari total BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), bukannlah hal mudah bagi Ditjen Bina Marga untuk mengelola BMN dengan jumlah yang sangat besar, sehingga sudah selayaknya sistem informasi sangat mendukung dalam penyediaan informasi yang andal atas posisi BMN maupun mutasi BMN kepada pengguna informasi. Selain itu, dukungan semua pihak dan koordinasi yang baik di Ditjen Bina Marga dalam merespon penggunaan sistem informasi atas pengelolaan BMN mendorong penyediaan informasi atas BMN yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengguna informasi tersebut dapat menerima manfaat dari penyediaan informasi tentang BMN di Ditjen Bina Marga khususnya untuk tujuan pengambilan keputusan.

Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Pengelolaan BMN

Dalam pengujian hipotesis diketahui bahwa kompetensi pegawai tidak berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan BMN. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Azhar et al. (2013), namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekayanti et al. (2018) yang menggunakan objek di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara, Gunawan et al. (2017) yang menggunakan objek di Pemerintah Kota Makassar, Arlini et al. (2014) yang menggunakan objek di BKKBN dan Rosihan et al. (2017) yang menggunakan objek di Pemerintah Provinsi Papua. Hasil pengujian ini juga tidak sejalan dengan temuan Puspitarini et al. (2017) dan Firmansyah et al. (2020a)

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pegawai pengelola BMN di Ditjen Bina Marga tidak mempengaruhi kualitas pengelolaan BMN. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diduga karena pegawai pengelola BMN di Ditjen Bina Marga memiliki pekerjaan utama yang lebih membutuhkan kompetensi yang sesungguhnya. Pekerjaan untuk mengelola BMN yang dilakukan oleh pegawai Ditjen Bina Marga merupakan pekerjaan tambahan yang dibebankan kepada pegawai akibat penunjukkan pimpinan instansi. Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pegawai pengelola BMN yang telah dilakukan oleh Ditjen Bina Marga terintegrasi dengan kemampuan pengetahuan atas sistem informasi, sehingga kompetensi yang dimiliki oleh pengelola BMN lebih kepada kemampuan dan pengetahuan atas pengoperasian sistem informasi untuk pengelolaan BMN.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, asas-asas dalam pengelolaan BMN mencakup asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai. Asas fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan BMN sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing – masing pejabat yang mengelola BMN. Asas kepastian hukum yaitu pengelolaan BMN yang harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang - undangan. Asas transparansi yaitu pengelola BMN harus transparan terhadap masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. Asas efisiensi yaitu pengelola BMN diarahkan agar BMN digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal. Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelola BMN harus dapat dipertanggungjawabkan. Asas kepastian

nilai yaitu pengelola BMN harus didukung oleh adanya ketentuan ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN serta penyusunan neraca pemerintah.

Sosialisasi atas perkembangan aturan dan layanan sistem informasi telah dilakukan oleh DJKN selaku instansi pembina BMN termasuk penggunaan SIMAN kepada seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia yang juga meliputi wilayah kerja Ditjen Bina Marga. Sosialisasi yang dilakukan oleh DJKN tersebut melakukan transfer knowledge kepada operator pengelola SIMAN di kantornya masing-masing. Program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan kepada pegawai pengelola BMN di lingkungan Ditjen Bina Marga lebih kepada perkembangan fitur-fitur sistem informasi atas pengelolaan BMN. (www.binamarga.pu.go.id) Oleh karena itu, selama sistem informasi sudah dikembangkan dengan baik, kompetensi pegawai tidak terlalu mempengaruhi kualitas pengelolaan BMN. Tingkat kompetensi pegawai dapat dilihat sebagian besar pegawai dapat menjalankan pekerjaannya baik pekerjaan rutin maupun pekerjaan tambahan yang bukan menjadi kewenangannya.

Peningkatan kualitas BMN di lingkungan kerja Ditjen Bina Marga erat kaitannya dengan dengan pelayanan publik yang diatur dalam Undang- Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Informasi tentang BMN yang disediakan kepada pemangku kepentingan erat kaitannya tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan BMN dalam suatu instansi. Kemampuan pegawai pengelola BMN seharusnya meliputi pengetahuan dan keterampilan dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Namun, dengan adanya aplikasi sistem informasi yang baik,

kemampuan tersebut bukan menjadi suatu hal yang wajib dipenuhi oleh pegawai pengelola BMN di lingkungan Ditjen Bina Marga (Ditjen Bina Marga, 2018)

Sebenarnya, selain pengembangan kompetensi pegawai yang disediakan oleh DJKN selaku Instansi Pembina dilaksanakan melalui kegiatan Training of Trainers dan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan para petugas pengelola BMN, pihak internal Ditjen Bina Marga juga menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) pengawasan dan pengendalian BMN di lingkungan internal untuk meningkatkan kapasitas pegawai pengelola BMN (Ditjen Bina Marga, 2018). Namun pengembangan kompetensi pegawai tersebut terintegrasi dengan sistem informasi yang sudah dirancang secara komprehensif, sehingga kemampuan pegawai dalam pengelolaan BMN lebih kepada kemampuan mengendalikan aplikasi sistem informasi atas BMN. Dalam pengelolaan BMN, tidak diperlukan kemampuan lainnya diluar dari pemahaman atas panduan aplikasi yang dikeluarkan oleh DJKN karena pengelolaan BMN sudah terintegrasi dengan sistem informasi yang ada (BPSDM KemenPUPR, 2018).

Tidak berpengaruhnya kompetensi SDM terhadap kualitas pengelolaan BMN dimungkinkan bahwa responden sebagian besar memiliki pendidikan S1 (69,8%). Tingkat pendidikan biasanya mempengaruhi tingkat kinerja pegawai. Namun, mengingat pengelolaan BMN di Ditjen Bina Marga merupakan pekerjaan yang dilaksanakan bersama dengan pekerjaan utama sesuai dengan tugas dan fungsi di instansi masing-masing pegawai, maka kinerja yang hendak dicapai adalah kinerja utama dari pekerjaan tugas dan fungsi tersebut, bukan berasal dari pengelolaan BMN.

Selain itu, responden dalam penelitian ini sebagai besar memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 tahun dalam pengelolaan BMN (76,19%). Oleh karena itu, sudah selayaknya sebagian besar pegawai memiliki pengalaman kerja di

bidang pengelolaan BMN yang cukup lama dan sudah terbiasa dengan pekerjaan ini. Oleh karena itu, dalam pengelolaan BMN jarang sekali dilakukan penggantian pegawai sehingga pekerjaan ini sudah tidak lagi menuntut kompetensi pegawai. Hal ini mungkin memberikan hasil berbeda apabila adanya tingkat pergantian pengelola BMN yang tinggi sehingga dapat terlihat dari masa kerja di bidang ini kurang dari 2 tahun. Berdasarkan usia responden sebagian besar responden dalam penelitian ini diatas 30 tahun (87,3%). Pegawai yang berkarir di organisasi pemerintah sebagai ASN biasanya memiliki tingkat perputaran pekerjaan yang rendah, yang dimulai berkarir pada usia muda, namun rendah dalam diversifikasi bidang pekerjaan sehingga tingkat pengalaman kerja sejalan dengan tingkat usia pegawai.

Menurut informasi dari Pembina BMN di DJKN, pegawai pengelola BMN di lingkungan Ditjen Bina Marga terdiri dari pegawai PNS dan Non PNS. Dalam pelaksanaan pengelolaan BMN, Ditjen Bina Marga secara rutin selalu memberikan pelatihan pengelolaan BMN setiap tahunnya. Pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMN jarang sekali dilakukan pergantian. Dengan keadaan yang seperti ini, maka kompetensi pegawai tidak akan berpengaruh pada kualitas pengelolaan BMN karena pegawai yang menjadi objek penelitian dapat dikatakan setara atau berada dalam level yang sama.

Secara umum, kompetensi SDM atas pemahaman terkait konsep pengelolaan BMN perlu terus diupdate, karena mekanisme pengelolaan BMN yang terus berkembang/dinamis. Menurut informasi dari pengamat BMN, pengelolaan BMN sering dianggap unit yang tidak strategis sehingga SDM yang ditugaskan disana seringkali juga merupakan SDM layer kedua atau bahkan ketiga. Namun demikian, issue kualitas SDM ini menjadi semakin mudah seiring dengan kesadaran K/L bahwa pengelolaan BMN tidak dapat lagi dipandang sebelah mata & mulai

menempatkan pegawai-pegawai terbaiknya. Di beberapa Kementerian/Lembaga, kualitas SDM dalam pengelolaan BMN tidak menjadi issue yang mengemuka, terutama untuk K/L yang memiliki SDM dengan kompetensi yang sudah sangat memadai, jumlah satker yang tidak terlalu banyak, jenis aset yang tidak beragam, dan/atau jumlah aset yang nilainya tidak begitu besar.

Selanjutnya, penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan BMN saat ini sangat mendominasi. Sebagai contoh SIMAK BMN, sangat mempermudah dalam melakukan penyusunan laporan BMN. Walaupun berkaitan erat dengan jurnal-jurnal akuntansi di dalamnya, namun dengan menu-menu yang familiar dan panduan manual yang mudah dipahami serta sosialisasi yang dilaksanakan, dapat membuat pegawai pengelola BMN yang berlatar belakang non akuntansi dapat memahami bisnis proses atas sistem tersebut dan melakukan analisis atas laporan yang ada. Terkait hal ini kompetensi khusus atas petugas pengelola BMN tidak dibutuhkan sehingga sepanjang petugas BMN tersebut adalah orang yang mau mengembangkan diri dan mau mempelajari sistem yang ada, maka pegawai tersebut dapat dengan mudah melaksanakan tugasnya.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Pengelolaan BMN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan BMN. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekayanti et al. (2018) dengan menggunakan objek Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, Rosihan et al. (2017) yang menggunakan objek Pemerintah Propinsi Papua. Penelitian ini mengkonfirmasi temuan oleh Firmansyah et al. (2020a) dalam konteks implementasi akuntansi berbasis akrual pada BMD.

Pekerjaan untuk mengelola BMN tersebut merupakan penunjang dari

pimpinan kepada pegawai di mana setiap satuan kerja harus memiliki pegawai yang bertanggung jawab dalam mengelola BMN. Pada intinya, pengelola BMN ini di satu sisi bekerja sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan harapan dapat bekerja sampai dengan pensiun, namun lebih memilih pekerjaan utamanya sesuai dengan tugas dan fungsi di instansi Ditjen Bina Marga.

Sebenarnya, ketika bekerja sebagai ASN, pegawai Ditjen Bina Marga memiliki kesempatan untuk dapat bekerja pada beberapa pilihan pekerjaan. Walaupun pegawai pengelola BMN di Ditjen Bina Marga senang untuk menceritakan pekerjaannya kepada orang lain, namun hal tersebut bukan menjadi jaminan bahwa perilaku tersebut dapat mempengaruhi kualitas pengelola BMN. Suatu hal yang normal bahwa pegawai yang memiliki tugas khusus di lingkungan instansi pemerintah akan senang untuk menyampaikan informasi dan menceritakan informasi terkait dengan bidang pekerjaannya kepada orang lain. Walaupun pegawai pengelola BMN di Ditjen Bina Marga merasa memiliki kedekatan emosional dan merasa bagian dari keluarga dari instansi di mana pegawai tersebut bekerja, namun bukan dalam hal ketika mereka dihadapkan untuk melaksanakan tugas tambahan seperti sebagai pengelola BMN. Pegawai tersebut cenderung merasa terpaksa untuk menerima tugas tambahan tersebut karena mereka mungkin lebih menyukai pekerjaan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi instansi.

Pandangan pegawai pengelola BMN sebagian besar menganggap bahwa sudah seleyaknya ASN harus loyal dengan pekerjaan, namun hal tersebut bukan terkait dengan pengelolaan BMN. Kalau dilihat terdapat anggapan bahwa instansi tempat bekerja saat ini merupakan tempat ideal untuk tempat bekerja bagi pegawai. Namun, kondisi tersebut tidak berlaku ketika pegawai Ditjen Bina Marga ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan pekerjaan

sebagai pengelola BMN. Anggapan ideal hanya berlaku ketika pegawai bekerja sesuai dengan tugas utamanya saja karena pegawai lebih nyaman dan tenang dibandingkan bekerja pada bidang lainnya. Begitupun halnya keengganan untuk meninggalkan instansi dilandasi alasan bahwa bekerja di lingkungan pemerintahan sifat pekerjaannya lebih stabil dibandingkan dengan profesi atau pekerjaan lainnya.

Pegawai yang memiliki tugas dalam mengelola BMN tidak merasa terganggu ritme hidupnya karena mereka menanggapi pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan tambahan bagi mereka. Apabila pegawai merasa berat untuk meninggalkan instansi ini lebih beralasan terkait dengan pekerjaan utama mereka. Selanjutnya, suatu hal yang normal bahwa ketika bekerja dalam suatu organisasi, tidak dapat dihindarkan adanya mutasi dan promosi pekerjaan. Kondisi tersebut merupakan hal yang biasa yang terjadi dalam organisasi karena pegawai pengelola BMN memiliki harapan bahwa mereka dapat tetap bekerja di instansi tersebut. Pegawai pengelola BMN merasa bahwa sebagai ASN bidang pekerjaan di masa mendatang adalah pekerjaan yang tidak terkait dengan pengelola BMN.

Sementara itu, responden merasa bahwa instansi tempat bekerja mereka saat ini merupakan tempat ideal untuk bekerja. Dalam pelaksanaan pekerjaannya, pengelola BMN merangkap pekerjaan lainnya yang dilakukan bersama dengan pekerjaan utama mereka terkait dengan tugas dan fungsi instansi masing-masing. Pegawai pengelola BMN menganggap bahwa mereka sadar menjadi ASN memiliki konsekuensi pekerjaan yang ditunjuk oleh pimpinan instansi. Namun pegawai pengelola BMN cenderung menginginkan pekerjaan di luar bidang pengelolaan BMN. Oleh karena itu, komitmen organisasi tidak mengakibatkan meningkatnya kualitas pengelola BMN karena pegawai pengelola BMN di Ditjen Bina Marga menganggap bahwa pekerjaan sebagai pengelola BMN tidak selamanya untuk dapat dijalankan. Mereka

menganggap bahwa masih terdapat adanya kesempatan untuk mutasi dan promosi pekerjaan dalam bidang pekerjaan yang berbeda dengan pengelola BMN.

Petugas pengelola BMN merupakan pekerjaan yang bersifat penunjukan. Petugas pengelola BMN ditetapkan jabatannya sebagai pengurus BMN/Penyimpan Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 dan diberikan honorarium setiap bulannya sesuai standar yang berlaku. Disamping itu saat ini DJKN selalu Instansi Pembina BMN saat ini sedang menyusun konsep jabatan fungsional atas pengelola BMN guna menjadikan jabatan pengelola BMN menjadi jabatan fungsional sehingga kinerja pengelola BMN bisa diukur dengan lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya jabatan ini di masa yang akan datang, pegawai di lingkungan Ditjen Bina Marga dapat memilih bidang pekerjaan ini yang terpisah dari pekerjaan utama mereka.

KESIMPULAN

Sistem informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan BMN. Penerapan SIMAK BMN dan SIMAN yang diberikan oleh DJKN kepada Satuan Kerja pada Kementerian dan Lembaga memberikan dampak yang sangat positif dalam pengelolaan BMN dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan BMN. Kompetensi pegawai tidak berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan BMN. Pegawai yang bekerja sebagai pengelola BMN menganggap bahwa pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan pokoknya. Pegawai di Ditjen Bina Marga memiliki tugas dan fungsi diluar dari pekerjaan tersebut, sehingga tidak dibutuhkan kompetensi spesifik dari pengelolaan BMN. Adanya aplikasi sistem informasi tidak membutuhkan keahlian khusus dalam pengelolaan BMN. Selama SOPnya jelas dan modul dari aplikasi SIMAK BMN dan SIMAN dapat dijalankan,

kualitas pengelolaan BMN semakin meningkat secara otomatis. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan BMN. Fungsi pekerjaan dalam pengelolaan BMN dimungkinkan tidak berlangsung lama. Adanya rotasi pekerjaan di bidang ini mengakibatkan pegawai di Ditjen Bina Marga tidak terlalu merasa akan terus menerus untuk menangani pengelolaan BMN.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa Pengelolaan BMN di Ditjen Bina Marga sangat tergantung dari kualitas sistem informasi yang dikembangkan oleh DJKN selaku Pembina BMN, sehingga pimpinan instansi di Ditjen Bina Marga perlu menginstruksikan kepada pegawai untuk mengikuti *Training of Trainers* yang dilaksanakan oleh DJKN selaku instansi Pembina khususnya terkait dengan perkembangan aplikasi sistem informasi terkini dalam pengelolaan BMN. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa DJKN perlu mengembangkan aplikasi sistem informasi yang lebih mudah digunakan (*user friendly*) mengingat pengelola BMN di instansi kementerian/Lembaga merupakan pekerjaan tambahan yang bukan merupakan pekerjaan inti, karena teknologi informasi terus berkembang. Oleh karena itu, diharapkan aturan yang diterapkan dan aplikasi akan selalu terintegrasi sehingga tidak membingungkan pengguna.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menggunakan responden atau data pada 1 eselon 1 di salah satu Kementerian/Lembaga yang menghasilkan sampel yang kecil. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan responden dalam 1 Kementerian/Lembaga atau beberapa Kementerian/Lembaga untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel-variabel lainnya di luar dari kompetensi pegawai dan komitmen organisasi seperti kepemimpinan, motivasi kerja serta dapat menggunakan objek yang

berbeda untuk membandingkan hasilnya dengan hasil penelitian ini. Selain itu, dalam penelitian selanjutnya dapat menguji kembali pengaruh kompetensi SDM dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai dan terhadap kinerja organisasi untuk membandingkan hasilnya dengan hasil dalam penelitian ini dengan menggunakan objek yang sama dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlini, M., Darwanis, D., & Abdullah, S. (2014). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi, regulasi dan kompensasi terhadap manajemen asset. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(4), 66–75.
- Azhar, I., Darwanis, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh kualitas aparatur daerah, regulasi, dan sistem informasi terhadap manajemen aset. *Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, 2(1), 15–26.
- BPKP. (2015). *Peran pengawasan intern mengamankan aset aegara*.
- BPPK Kemenkeu. (2015). *Tujuan dan arah pengelolaan barang milik negara*.
- BPSDM KemenPUPR. (2018). *Pelatihan pengelolaan BMN di Ambon*.
- Ditjen Bina Marga. (2018). *Tingkatkan pengelolaan BMN, Setditjen Bina Marga adakan Bimtek*.
- DJKN Kemenkeu. (2017). *Pengelolaan kekayaan negara: dulu, kini, dan mendatang*.
- Ekayanti, S. M., Rifa, A., & Irwan, M. (2018). Determinants of effectiveness fixed asset management of district government on the island of Lombok. *International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER)*, 9(1), 1219–1229.
- Firmansyah, A., Wibowo, P., & Puspitarini, I. (2020a). Implementation of accrual based accounting on regional property in Indonesia : competence employees and organizational commitments perspective. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(7), 9502–9512.
<https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I7/P R270954>
- Firmansyah, A., Wibowo, P., & Puspitarini, I. (2020b). The effect of good governance and information technology on the implementation of accrual-based accounting to regional properties. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(6), 1945–1955.
<https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I6/P R260186>
- Garmendia, C., & Kapur, A. (2013). *Enhancing government property with data and technology* (M-RCBG Associate Working Paper Series No. 21).
- Gunawan, H., Haming, M., Zakaria, J., & Djamareng, A. (2017). Effect of organizational commitment, competence and good governance on employees performance and quality asset management. *IRA-International Journal of Management & Social Sciences*, 8(1), 17–30.
<https://doi.org/10.21013/jmss.v8.n1.p3>
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi pemerintahan*. In Media.
- Itjen KemenPUPR. (2020). *Barang milik negara dan permasalahannya*.
- Kemenkumham. (2017). *Road map, solusi permasalahan klasik pengelolaan BMN*.
- Menteri Keuangan. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur*.
- Puspitarini, I., Amrie, F., & Handayani, D. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada pengelolaan barang milik negara. *Journal Of Applied Managerial*

- Accounting*, 1(2), 141–149. <https://doi.org/10.30871/jama.v1i2.501>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Rosihan, R., Bharranti, B. E., & Ratang, W. (2017). Pengaruh kualitas aparatur daerah, regulasi, sistem informasi dan komitmen terhadap manajemen asset (studi pada pemerintah Provinsi Papua). *Jurnal Keuda*, 2(1), 1–16. <https://media.neliti.com/media/publications/217583-pengaruh-kualitas-aparatur-daerah-regula.pdf>
- Sedarmayanti, S., & Elianie, E. L. (2015). Pengaruh kompetensi pegawai terhadap efektivitas penatausahaan barang persediaan pusat sains dan teknologi nuklir terapan- Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 251–266. <https://doi.org/10.31113/jia.v12i2.83>
- Sujarweni, V. W. (2015). *SPSS Untuk Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Wahyuni, S., Fadah, I., & Tobing, D. S. (2018). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan melalui pengelolaan barang milik daerah. *Bisma: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 12(1), 66–80. <https://doi.org/10.19184/bisma.v12i1.7602>